

PARTISIPASI POLITIK WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DESA (PILKADES) DESA RENGAS KAPUAS KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Fety Novianty¹, Zuldafrial²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial IKIP PGRI Pontianak, Jalan Ampera No 88 Pontianak Telp (0561) 748219
e-mail : putrikhanza96@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian yang berjudul Analisis Partisipasi Politik Warga Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Desa di Desa Rengas Kapuas kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Raya ini bertujuan untuk mengetahui kesadaran politik masyarakat serta untuk mengetahui faktor apa saja yang mendukung kesadaran politik masyarakat desa tersebut dalam pemilihan kepala desa (pilkades). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuknya studi deskriptif analitis. Lokasi penelitian di daerah Desa Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya dengan subyek penelitian nya terdiri dari masyarakat serta apparatus desa setempat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi langsung, teknik komunikasi langsung, dan Teknik studi dokumenter. Alat pengumpul data yang digunakan seperti panduan observasi, panduan wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala desa di desa rengas Kapuas kecamatan sungai kakap sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari munculnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti pemilihan serta banyaknya factor yang mendukung dalam kegiatan pilkades tersebut seperti terbentuknya antusiasme masyarakat dalam kegiatan pilkades, peran media massa serta kinerja KPUD yang ikut menunjang dalam pelaksanaan kegiatan Pilkades di desa tersebut.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Warganegara, Pilkades

Abstract

The research, entitled Political Participation of Citizens in the General Election of Village Heads in Rengas Kapuas Village, Sungai Kakap District, Raya Regency, aims to determine the political awareness of the community and to find out what factors support the political awareness of the village community in the village head election (pilkades). This study uses a qualitative method in the form of an analytical descriptive study. The research location is in the area of Rengas Kapuas Village, Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency with the research subjects consisting of the community and local village apparatus. Data collection techniques used are direct observation techniques, direct communication techniques, and documentary study techniques. The data collection tools used were observation guides, interview guides, and documentation. The results obtained that the political participation of the community in the general election of village heads in the village of Rengas Kapuas, Sungai Kakap sub-district has been going well, this can be seen from the emergence of public awareness in participating in the election and the many factors that support the Pilkades activities such as the formation of community enthusiasm in participating in the election. Pilkades activities, the role of the mass media and the performance of KPUD which support the implementation of Pilkades activities in the village.

Keywords: Political Participation, Citizens, Pilkades

PENDAHULUAN

Demokrasi dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem demokrasi rakyat memberikan kesempatan yang sama dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Abdulkarim (2007: 15), pemerintah yang berpegang pada demokrasi merupakan pemerintah yang dipegang oleh rakyat atau setidaknya diikutsertakan dalam pembuatan suatu keputusan politik pemerintahan atau kenegaraan.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Partisipasi politik memiliki makna

yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik dan praktik demokratisasi di Indonesia akan berjalan dengan baik. Sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini.

Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan memengaruhi kehidupan warga negara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang memengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warga negara biasa dibagi dua memengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Di Indonesia berpartisipasi politik dijamin oleh negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang” dan diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 mengenai jaminan hak-hak sipil dan politik, dimana poin-poin hak yang harus dilindungi oleh negara mengenai hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak sama dihadapan hukum dan pemerintahan, hak mendapatkan keadilan, dan lain-lain. Paska pemilihan presiden 2014 secara langsung, wacana dan kehendak publik untuk memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung di Indonesia makin menguat. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Menurut Wasistiono (2006: 32) tentang pemilihan kepala desa menyatakan bahwa apabila pemilihan umum merupakan pesta pemerintah, maka pemilihan kepala desa (pilkades) adalah pesta rakyat. Pemilihan kepala desa merupakan kesempatan rakyat untuk menunjukkan kesetiaan masyarakat desa. Pemilihan kepala desa (pilkades) dilakukan dalam enam tahun. Hal ini sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi: “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Menurut Soekanto (1982: 125) terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, antara lain: pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku (tindakan). Kesadaran politik warga negara menjadi faktor determinan

dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Pengalaman pemilihan kepala desa yang berlangsung dalam beberapa dekade menunjukkan banyaknya para pemilih yang tidak memberikan suaranya. Sebagai fenomena penggambaran di atas apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif, sedangkan apabila kesadaran politik dan kepercayaan sangat rendah maka partisipasi politik menjadi pasif dan apatis.

Rendahnya partisipasi masyarakat merupakan masalah nasional, sehingga penanganannya tidak selalu diserahkan pada salah satu pihak, diperlukan keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk menangani masalah ini. Setiap wilayah maupun periode pemilihan kepala desa selalu ditemukan keunikannya masing-masing, secara umum pemilihan kepala desa sangat kental akan kedekatan emosi karena pemilih mengenal betul orang-orang yang mencalonkan diri menjadi kepala desa, juga didukung adanya hubungan kekerabatan, dan persaingan yang tajam antar tim sukses calon kepala desa.

Dalam partisipasi politik pengetahuan dan pemahaman sangat diperlukan, karena sebagai warga negara atau individu tentunya harus mengetahui dan memahami mengenai isu-isu yang bersifat politis, dengan seperti itu akan mampu meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik atau pengetahuan dalam berpolitik. Sikap dan tindakan politik juga diperlukan dalam partisipasi politik karena dapat menyadari akan tanggung jawab sebagai warga negara yang menentukan masa depan bangsa.

METODE

Berdasarkan pada masalah yang telah dirumuskan, maka secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitiannya studi deskriptif analitis. Dapat dikatakan bahwa bentuk penelitian deskriptif merupakan bentuk penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, atau fenomena dari peristiwa yang terjadi. Berdasarkan masalah penelitian di atas, peneliti menggunakan bentuk penelitian deskriptif. Hal ini disebabkan peneliti menganalisis tentang bagaimana Analisis Partisipasi Politik Warga Negara dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik komunikasi langsung dan teknik studi dokumenter dengan alat pengumpul datanya terdiri dari pedoman wawancara dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan berupa teknik

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Untuk Teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, display data dan verifikasi data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum kepala desa di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya

Pemilihan Umum Kepala Desa (Pilkades) yang dilakukan secara serentak merupakan reformasi sistem pemilihan kepala daerah karena menyisakan persoalan berupa tingginya ongkos demokrasi maka hadirnya pilkades serentak menghemat anggaran dan mengefisieni waktu. Persoalan-persoalan dalam pilkada serentak tersebut tentu akan berimplikasi pada partisipasi masyarakat dalam pilkades, jika pada pilkades sebelumnya yakni pilkades langsung yang dilaksanakan setiap 5 tahun. Disamping itu pemilihan legislatif dan eksekutif yang juga menyita waktu yang banyak akan membuat masyarakat merasa jenuh untuk ikut berpartisipasi karena setiap kali harus mendatangi TPS untuk mencoblos. Persoalan anggaran juga sangat berdampak karena negara akan mengeluarkan biaya yang besar untuk menugaskan perangkat-perangkat daerah dalam mensosialisasikan dan mendata masyarakat di setiap daerah. Dengan reformasi sistem pilkada serentak diharapkan akan memberikan pengaruh pada partisipasi masyarakat karena masyarakat tidak perlu sering ke TPS lagi dan meninggalkan aktivitasnya yang sangat penting atau jika berada diperantaun tidak perlu lagi bolak-balik ke daerah untuk mencoblos lagi.

Merujuk pada hasil wawancara peneliti dengan GT (Ketua KPU Kubu Raya) bahwa agenda pemilihan umum kepala desa yang dilakukan serentak di Kabupaten Kubu Raya merupakan keputusan politik oleh penguasa dalam menjalankan proses demokratisasi di Negara Indonesia. Pilkada serentak yang dicetuskan pemerintah disambut baik oleh Provinsi Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Kubu Raya, Kecamatan Sungai Kakap, Desa Rengas Kapuas. Implikasi positif yang dirasakan oleh penyelenggara yaitu menekan konflik-konflik horizontal dan gesekan-gesekan dalam masyarakat seperti yang terjadi pada pilkada langsung sebelumnya, intinya pilkada serentak efisien dan efektif untuk dilaksanakan. Partisipasi masyarakat di Desa Rengas Kapuas ini dilatarbelakangi oleh alasan-alasan yang berbeda, Keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi di daerah tidak bisa dipungkiri adanya kepentingan-kepentingan tertentu, tipe masyarakat juga menentukan sikapnya terhadap kegiatan pemerintahan. Ada yang apatis, kritis dan memiliki kesadaran politik yang tinggi.

Merujuk dari hasil wawancara diatas, Sitepu (2012) mengungkapkan bahwa partisipasi politik ialah suatu kegiatan dari warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung (tidak sengaja) terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dapat dilakukan oleh individu-individu maupun kelompok secara spontan maupun dimobilisasi. Disisi lain juga merumuskan bahwa partisipasi politik adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk ikutserta secara aktif dalam kehidupan politik yakni dengan memilih pimpinan negara baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah

Partisipasi politik dibedakan menjadi beberapa kategori,dapat dilihat dari bentuk kegiatannya,partisipasi politiknya dan tinggi rendahnya partisipasi politik, yakni (Sastroatmodjo, 1995: 8-10):

- a) Dilihat dari bentuk kegiatannya,partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi politik aktif dan partisipasi politik pasif. Partisipasi aktif dapat dilakukan melalui pengajuan alternatif kebijakan umum,mengajukan petisi,membayar pajak, dan sebagainya. Sementara partisipasi politik pasif ditunjukkan melalui kegiatan yang mencerminkan ketaatan dan penerimaan atas hal yang menjadi keputusan pemerintah.
- b) Dilihat dari tingkatannya dapat dibedakan menjadi apatis,spektator dan gladiator. Apatis artinya tidak menaruh perhatian sama sekali pada kegiatan politik dan bersikap masa bodoh. Spektator artinya bahwa orang bersangkutan setidaknya ikut menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gladiator merupakan tingkatan partisipasi politik sampai pada keikutsertaan secara aktif dalam proses politik.
- c) Partisipasi politik dapat digolongkan sesuai dengan jumlah pelaku yang terlibat didalamnya. Atas dasar,partisipasi politik juga dapat digolongkan menjadi partisipasi individual dan partisipasi kolektif.
- d) Dilihat dari tinggi rendahnya partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif, partisipasi yang pasif tertekan(apatis),partisipasi militan radikal, dan partisipasi yang tidak aktif. Aktif jika masyarakat memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi dan percaya pada sistem yang ada. Pasif tertekan apabila kesadaran politik ada dan kepercayaan terhadap sistem politik sangat rendah.

Menurut Kepala Desa Rengas Kapuas HK yang terpilih pilkada tahun 2019, memaparkan bahwa Partisipasi politik masyarakat dalam Pilkades di Desa Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap tahun 2019 menjadi sebuah hal yang menarik untuk dilihat seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat dalam peristiwa politik tersebut. Karena Pemilihan Kepala Desa menjadi indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi di sebuah wilayah. Dalam konteks penulisan ini, Pilkades dianggap sebagai sebuah peristiwa periodik yang akan berlangsung, tetapi dalam pelaksanaannya selalu meninggalkan catatan penting tentang sejauh mana tingkat partisipasi masyarakatnya. Harapan baru akan format demokratisasi negeri ini juga tertuang dalam berbagai peristiwa Pilkada yang berlangsung sejak tahun 2005. walau sebagian masyarakatnya masih bersifat skeptis akan tahapan demokrasi bangsa ini terutama tentang materi dan

infrastruktur yang mendukungnya yang dianggap tidak siap. Tetapi sejauh apapun pemilu berlangsung, hal ini merupakan jalan dalam penguatan demokrasi yang idealnya. Data jumlah penduduk sementara yang diperoleh oleh peneliti berjumlah 19.228 jiwa. Partisipasi politik Masyarakat pada pemilihan kepala desa tahun 2019 di Desa Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya sungguh fenomenal jumlah pemilih mencapai 12.354 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Wawancara dengan Ketua KPU Kubu Raya KY mengungkapkan bahwa masyarakat kali ini sudah semakin sadar dengan kewajiban sebagai warga Negara dalam konteks demokrasi, dilihat dengan antusias masyarakat dalam menggunakan hak politik cukup tinggi.

2. Faktor pendukung yang mempengaruhi kesadaran politik masyarakat di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya

Faktor pendukung tingginya Partisipasi Masyarakat di Desa Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya tahun 2019, antara lain :

a) Terbentuknya Antusiasme

Dari pemaparan pada pembahasan masalah yang pertama, kita dapat melihat bahwa didalam momentum politik pemilihan kepala desa (pilkades) Sungai Rengas sudah baik, hal ini dapat dilihat dari masyarakat nya yang menentukan pilihan dan menggunakan hak politiknya. Adapun faktor yang mendukung fenomena politik ini diakibatkan dari terbentuknya kesadaran dan antusiasme masyarakat yang mandiri untuk menggunakan hak politiknya, dengan pertimbangan bahwa calon yang hadir dalam pentas Pilkada pemilihan kepala desa cukup memiliki kapasitas dalam mewujudkan harapan mereka. Pertimbangan untuk memilih dan melihat calon yang hadir serta bertarung didalam pemilihan memiliki kapasitas adalah sebuah alasan yang sebenarnya rasional dan kritis. Hal ini dapat dikatakan demikian apabila ditinjau dari alasan masyarakat kenapa menganggap calon yang hadir cukup memenuhi kapasitas untuk membawa kepentingannya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat AT, beliau menuturkan bahwa, “para calon kali ini cukup dekat dengan masyarakat, mereka selalu turun ke lapangan, perkunjungan, dan berdialog langsung dengan masyarakat. Karena wilayah Kecamatan ini tidak begitu luas, kadang-kadang dalam sehari ada beberapa calon yang datang. Kedatangannya pun sering membawa sesuatu bagi masyarakat. Ini membuat masyarakat selalu menunggu-nunggu kehadiran para calon dan tentunya hari pelaksanaan pemilihan”.

b) Peran Media Massa

Elemen dari sebuah tahapan demokrasi yaitu disaat media menempatkan perannya dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Isi media dalam memberikan informasi secara luas mengenai Pilkades juga mendorong terciptanya kesadaran orang untuk menentukan pilihannya. Rendahnya intensitas mengenai kampanye peristiwa politik dan penyelenggaraan Pilkada mendorong menurunnya informasi yang diterima sehingga berakibat pada rendahnya keterlibatan masyarakat didalam pilkada. Dengan pemahaman dan konstruksi bersama maka pesan yang disampaikan oleh media di Kabupaten Kubu Raya dapat mengkomunikasikan tujuannya. Pesan yang dihadirkan oleh media dalam mendorong tingkat partisipasi yang tinggi telah mencirikan karakteristik khalayak dan memiliki efek dalam melakukan agitasi. Hanya dengan cara demikian diharapkan suatu pesan, mengenai pentingnya partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan politik dapat diterima oleh masyarakat umum. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh tokoh masyarakat AG, beliau menuturkan, “masyarakat di Desa Rengas Kapuas ini sangat rajin mengikuti perkembangan proses pilkada melalui media massa. Hal ini menjadi salah satu keuntungan bisnis bagi media, sehingga pemberitaan dilakukan secara terus menerus. ini telah menjadi salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tahu dengan pasti tentang proses Pilkades di Desa Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.”

c) Kinerja KPUD

Penataan daftar pemilih tetap (DPT) yang baik sangat mendukung tingginya partisipasi politik. Persoalan ini sering menjadi masalah selama pelaksanaan Pilkades karena banyaknya warga yang sering tidak terdaftar sehingga menjadi sebuah permasalahan krusial yang tidak mendapatkan solusi. Tidak demikian halnya dengan Kabupaten Kubu Raya. Hal ini tidak terlepas dari kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai lembaga yang melaksanakan dan penyelenggara Pilkades. Kinerja KPUD sebagai lembaga penyelenggara sudah cukup baik. Persoalan itu adalah sejauh mana KPUD melakukan kampanye progressif untuk mendorong masyarakat supaya menentukan pilihan politiknya dan ikut berpartisipasi di dalam Pilkades. Walau terkadang kepentingan masyarakat dipengaruhi oleh kepentingan individual pemilih, yang memprioritaskan kebutuhan individunya dari pada melakukan pencoblosan. Hal ini juga disebabkan keberhasilan elemen politik termasuk KPUD untuk melakukan pendidikan politik masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh PM salah satu

masyarakat, “KPU sudah cukup profesional dalam bekerja, walaupun masih ada kekurangannya, tetapi kalau menyangkut sosialisasi kepada masyarakat, sudah cukup baik.”

SIMPULAN

Partisipasi Politik Warga Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Desa (Pilkades) di Desa Rengas Kapuas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari munculnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti pemilihan serta banyaknya faktor yang mendukung dalam kegiatan pilkades tersebut. Pilkades dianggap sebagai sebuah peristiwa periodik yang akan berlangsung, tetapi dalam pelaksanaannya selalu meninggalkan catatan penting tentang sejauh mana tingkat partisipasi masyarakatnya. Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat kali ini sudah semakin sadar dengan kewajiban sebagai warga Negara dalam konteks demokrasi, dilihat dengan antusias masyarakat dalam menggunakan hak politik yang cukup tinggi.

Antusias masyarakat menjadi faktor pendukung yang mempengaruhi pada kesadaran politik masyarakat. Adapun faktor yang mendukung fenomena politik ini diakibatkan dari terbentuknya kesadaran dan antusiasme masyarakat yang mandiri untuk menggunakan hak politiknya, dengan pertimbangan bahwa calon yang hadir dalam pentas Pilkada pemilihan kepala desa cukup memiliki kapasitas dalam mewujudkan harapan mereka, selain itu media massa menjadi saluran komunikasi yang sangat tepat untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Sebagai lembaga yang netral, saat ini media menjadi salah satu lembaga yang sangat dipercayai oleh masyarakat. Dengan begitu, peningkatan partisipasi masyarakat media diharapkan mampu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk mau menggunakan hak pilinya dalam Pemilukada dan salah satunya adalah pilkades. Kinerja KPUD, Kinerja KPUD sebagai lembaga penyelenggara sudah cukup baik. Persoalan itu adalah sejauh mana KPUD melakukan kampanye progressif untuk mendorong masyarakat supaya menentukan pilihan politiknya dan ikut berpartisipasi di dalam Pilkades. KPUD meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui cara sosialisasi dan pendidikan politik masyarakat. Cara tersebut dilakukan melalui tiga tahapan yakni melalui komunikasi tatap muka, komunikasi melalui media, dan melalui mobilisasi sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Adisucipto (2014) Budaya politik lokal dan partisipasi politik masyarakat didesa sumber Sari kecamatan sebulu dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014.

- Azhary, Tahir. 2003. Negara Hukum. Cetakan II. Jakarta: Prenada Media
- Bari, Abdul. 2005. Pemilu & Partai Politik Di Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Budiarjo, Miriam. 1977. Dasar-Dasar ilmu Politik. Jakarta: P.T. Gramedia
- _____. 1996. Demokrasi Di Indonesia, Demokrasi Parlementer, dan Demokrasi Pancasila. Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Dian yuliani sugiaryo,(2016) hubungan kesadaran politik dan civic disposition dengan partisipasi politik pemilih pemula dalam pilkades didesa kloran,kecamatan colomadu,kabupaten karangan tahun 2016 .
- Irayuleni. (2016) Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Periode 2015-2020 (Studi Kasus Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara).
- Mayayuliantina. (2016) Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik dalam pemilihan Kepala Desa Di Desaa Hajimena Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Des
- Sugiyono, (2012). Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2013). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Syaukani, Imam. 2004. Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Yamin. 1982. Proklamasi & Konstitusi Indonesia. Jakarta: Galilia.
- Zuldafrial, (2011). Pendekatan Penelitian Dan Teknik Penulisan Karya Ilmiah, Pontianak: Pustaka Abuya.